

Daftar Pustaka

A. *Aturan Hukum*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum Amandemen.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pembentukan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948.

Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Indonesia Timur, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 6.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 83.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2779.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839.

Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan) tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 94, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1843.

Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 (disempurnakan) tentang DPRD-Gotong Royong dan Sekertariat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2042.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6.

Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat.

Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Kepada Camat Dan/Atau Kelurahan/Kepala Desa.

Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Kecamatan, Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor.

B. Buku

Abdullah, Rozali, 2002, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ali, Chidir, 1981, *Hukum Adat Bali dan Lombok Dalam Yurisprudensi Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Ali, Zainuddin, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Arikunto, Suharsimi, 1990, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
-, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, rineka Cipta, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
-, “Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia”, dalam *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Prenadamedia, Jakarta, hlm. 27-37.
- Azwar, Saefuddin, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Black, Donald, 1984, “Social Control As A Dependent Variable,” dalam *Toward A General Theory of Social Control*, Center for Criminal Justice Harvard Law School dan Academic Press, Massachusetts, Orlando, San Diego, San Francisco, New York, Landon, Toronto, Montral, Sydney, Tokyo, dan Sao Paulo.
- Bungin, Burhan, 2010, *Penelitian Kualitatif*, Kencana, Jakarta.
- Corwin, Edward S. dan Peltason, Jack W., 1966, *Understanding The Constitution*, University of Illinois, USA.
- Darmawan, Deni, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Denzin, N.K. dan Yvonna S.L., 2009, *Handbook of Qualitative Research*, terj. Darioyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dicey, A. V., 1971, *Introduction to The Study of The Law of The Constitution*, English Language Book Society and MACMILLAN Press, New York.
- Etamamang, Sangadji dan Sopiah, 2010, *Metodelogi Penelitian*, Andi, Yogyakarta.
- Fuady, Munir. 2013, *Teori-Teori Besar “Grand theory” Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ghony, M. Djunsifi dan Almanshur, Fauzan, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Hardjasoemantri Koesnadi, 2012, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M. Dkk., 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Gadjah Mada Univeristy Press, Yogyakarta.

- Hikmat, Mahi M., 2011, *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Huda Ni'matul, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
-, 2009, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hughes, L. Blaxter C. dan Tight, M., 2001, *How To Research*, Open University Press, Maidenhead.
- Ilmar, Aminuddin, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia, Jakarta.
- Indrawan, Ruli dan Yaniawati, R. Poppy, 2014, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*, Reflika Aditama, Bandung.
- Indrayana, Denny, 2007, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*, Mizan, Bandung.
- Juanda, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Anatara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung.
- Kaligis, 2011, *Praktik-Praktik Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Kansil dan Christine, 2004, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Karim, Abdul Gaffar, 2003, "Bangunan Goyah Di Atas Fondasi Bermasalah: Otonomi Daerah Di Indonesia", dalam *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kasiram, Moh., 2008, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, UIN Maliki Press, Malang.
- Kuhn, Thomas S., 1970, *The Structure of Scientific Revolutions*, The University of Chicago Press, United States of America.
- Kusumohamidjojo, Budiono, 2016, *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*, Yrama Widya, Bandung.
- Mahfud, Moh., 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
-, 2012, *Politik Hukum di Indonesi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Makhfudz, M., 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

- Manan, Bagir, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Martono Nanang, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Rajawali Press, Jakarta.
- Marwan M. dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition): Rangkuman Istilah dan Penggunaan Dalam Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak, dan Hukum Lingkungan*, Reality Publisher, Surabaya.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
-, 2014, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
-, 2014, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mulyana, Dedi. 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Munir, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung.
- Nawawi, Hadari, 1996, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Noor, Juliansyah, 2013, *Metodelogi Penelitian*, Kencana, Jakarta.
- Novia Windy, 2009, *Kamus Ilmiah Populer Edisi Lengkap: Refrensi Ilmiah, Sains, Politik, Hukum, Sosial dan Budaya Juga Dilengkapi Dengan Pengetahuan Ilmiah dan Umum*, Wacana Intlektual, TTP.
- Patilima, Hamud, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Perry, Marvi., 2013, *Peradaban Barat Dari Revolusi Prancis Hingga Zaman Global*, terj. Saut Pasaribu, Kreasi Wacana, Bantul Yogyakarta.

- Pratikno, 2011, Dalam Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia, *Desentralisasi: Pilihan Yang Tidak Pernah Final*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ridwan, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Gravindo Persada, Jakarta.
- Rondinelli, Dennis A. and Cheema, G. Shobbir., 1983, "Implementing Decentralization Policies: An Introduction", dalam *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*, SAGE, USA.
- Rosidin Utang, 2015, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Bandung.
- Santoso Agus, 2013, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Siswanto, Victorianus Aties, 2012, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Silalahi, Ulber, 2006, *Metode Penelitian Sosial*, Unpad Press, Bandung.
- Situmorang, Victor M., 1994, *Hukum Administrasi Pemerintahan DI Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Smith, Brian C., 1985, *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*, George Allen and UNWIN Publishers, London.
- Soehino, 1992, *Hukum Tatanegara: Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
-, 2002, *Perkembangan Pemerintahan Di Daerah*, Liberty, Yogyakarta.
- Soemantri, Sri, 2014, *Otonomi Daerah*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Saunders, Chery1, 1991, "Constitutional and legal aspects", dalam *Intergovernmental Relations and Public Policy*, Allen and Unwin, Sydney.
- Sudantoko, Djoko, 2003, *Dilema Otonomi Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Sujamto, 1993, *Perspektif Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sukandarumidi, 2012, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti*, UGM Pres, Yogyakarta.
- Sumadi, Ahmad Fadil, 2013, *Politik Hukum, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Setara Press, Malang.
- Sunarto, Siswanto, 2016, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syaukani, dkk., 2009, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar dan Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan (PUSKAP), Yogyakarta.

Triwulan Titik, dan Widodo, Ismu Gunadi., 2016, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Widjaja, 2003, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yasin, M. Nur, 2008, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, UIN Malang Press, Malang

Zoelva, Hamdan, 2012, “Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Negara Hukum Demokrasi Indonesia”, dalam *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Prenadamedia, Jakarta.

C. Karya Tulis Ilmiah Lainnya

Adib Zata Ilmam, M., 2013, *Manajemen Konflik Oleh Pemerintah Daerah Studi Kasus Konflik Sosial Di Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah*, Tesis Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Astuti, Junita, 2013, *Pelayanan Fungsi Camat Dalam Rangka Melaksanakan Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Di Kota Yogyakarta*, Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Husaini, Adrian Louisian, 2013, *Implikasi Kedudukan Camat Terhadap Kemandirian Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Kecamatan Medan Helvetia)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Irfan, Matlaul, 2002, *Perkawinan dalam Masyarakat Bangsawan suku Sasak, tinjauan tentang penerapan konsep Kafa'ah dalam Islam*, dalam Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Jaelani, Abdul Qadir, 2017, *Implikasi Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur*, Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Nurjihadi, Ahmad, 2002, *Tradisi Merariq Dalam Evolusi Keluarga Muslim Di Masyarakat Sasak Perkotaan Kontemporer*, dalam Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Saring, Ansela, 2011, *Urgensi Pemekaran Kecamatan Di Kabupaten Kapuas Hulu Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*, Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Susilowati, Hendar, 2014, *Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia (Studi Kasus di DIY)*, Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Taisir, Muhammad, 2002, *Adat Kawin Lari masyarakat suku Sasak ditinjau dari segi Hukum Islam*, dalam Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Yulianto, 2016, *Kedudukan dan Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Studi Kasus Kantor Camat Pallangga, Kabupaten Gowa)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.

D. Materi Perkuliahan dan Publikasi Lainnya

Mahfud, Moh., perkuliahan kelas Doktor Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam, di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada tanggal 14 Maret 2016, jam 12.00-12.20.

Muchsan, perkuliahan kelas Magister Hukum Kenegaraan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tanggal 19 Agustus 2016, Jam 16.30-17.45.

Sumardjono, Maria SW., 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sri Mulyani dalam kuliah umum di Auditorium Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 23 Agustus 2017, jam 11.30.

Badan Statistik Kabupaten Lombok Tengah, *Katalog Dalam Penerbitan Kecamatan Praya, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Tengah, Praya Timur, Janapria, Kopang, Batukeliang, Batukeliang Utara, Jonggat, Pringgarata, dan Kecamatan Pujut Dalam Angka 2017*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah BPS (*Statistics Of Lombok Tengah Regency*), Kabupaten Lombok Tengah Dalam Angka (*Lombok Tengah Regency in figures*) Tahun 2017, Nomor Katalog: 1102001.5205.

Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun Anggaran 2015.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Praya Timur Dalam Angka Tahun 2017

E. Web dan Lainnya

Vlog Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Tanggal 21 Oktober 2017, “#JKWVLOG INDAHNYA MANDALIKA”, *You Tube*, dilihat dan diakses pada tanggal 23 Januari Tahun 2018.

Fiki Ariyani, “Di Bagun 2018 RI, Bakal Punya Sirkuit MotoGP Di Lombok”, *Liputan6.com, Lombok Tengah*, di akses pada tanggal 19 Februari 2018.

Muhammad Nursyamsyi dan Winda Destiana Putri, “Sirkuit MotoGP Lombok Ditargetkan Beroperasi Pada 2019”, *News Republika.Co.Id, Mataram*, diakses pada tanggal 19 Februari 2018.

Bambang Supriyanto, “KEK Mandalika, ITDC Resmikan Kantor Oprasional di Lombok”, *Kabar24, Bisnis.com*, diakses pada tanggal 19 Februari 2018. Dalam meresmikan kantor oprasional ITDC di Lombok, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro didampingi oleh Presiden Islamic Development Bank (IDB) Ahmad Mohamed Ali Al-Madani, Bambang juga mendengarkan penjelasan Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (Persero) Abdulbar M. Mansoer tentang konsep Kawasan Wisata Mandalika Resort di sela peresmian Kantor ITDC di Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah BPS (*Statistics Of Lombok Tengah Regency*), Kabupaten Lombok Tengah Dalam Angka (*Lombok Tengah Regency in figures*) Tahun 2017, Nomor Katalog: 1102001.5205.

Admin Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah, “Sejarah Kabupaten Lombok Tengah”, <http://lomboktengahkab.go.id/2013/05/20>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2018.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Lembaran Negara”, <https://id.wikipedia.org/wiki>. Diakses Tanggal 21 Februari 2018.

Tribunnews.com, “Peta NKRI Diperbaharui, ini Lima perubahan dari peta sebelumnya” <https://images.goole.co.id>, diakses pada tanggal 24 Mei 2018.

Wikipedia, “Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia”, <https://www.google.co.id>, diakses pada tanggal 22 Februari 2018.